

Kolaborasi Aktor dalam Pengelolaan Pedagang Wisata di Kawasan Pantai Kenjeran Surabaya

Rizaldo Febriansyah¹, Yusuf Hariyoko², Indah Murti³

¹²³ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

rizaldof7@gmail.com

yusufhari@untag-sby.ac.id

indah@untag-sby.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Pengelolaan pedagang wisata di kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya, melibatkan beragam aktor dengan peran, kepentingan, dan sumber daya yang berbeda. Kompleksitas tata kelola memunculkan kebutuhan kolaborasi lintas aktor agar tercipta kebijakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika jaringan aktor dalam tata kelola pedagang wisata di Pantai Kenjeran, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan adanya interdependensi kuat antara pemerintah, UPTD, Satpol PP, pedagang, dan masyarakat, meskipun forum komunikasi formal yang inklusif belum terbangun secara optimal. Pertukaran sumber daya, kepercayaan, serta hubungan personal menjadi kunci dalam memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan. Namun, keterbatasan kapasitas pedagang, minimnya pelibatan masyarakat, dan rendahnya peran swasta menjadi tantangan dalam menciptakan tata kelola yang adaptif dan partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum

komunikasi rutin, peningkatan pendampingan pedagang, serta mendorong kemitraan multiaktor sebagai langkah strategis memperbaiki tata kelola kawasan wisata secara berkelanjutan.

Kata Kunci: jaringan aktor, tata kelola, pedagang wisata, Pantai Kenjeran, Surabaya

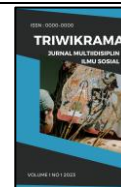
A B S T R A C T

The management of tourist traders in the Kenjeran Beach area, Surabaya, involves various actors with different roles, interests, and resources. The complexity of governance raises the need for cross-actor collaboration to create fair, effective, and sustainable policies. This study aims to analyze the dynamics of actor networks in the governance of tourist traders in Kenjeran Beach, using a qualitative descriptive approach with observation and in-depth interview methods. The results of the study indicate a strong interdependence between the government, UPTD, Satpol PP, traders, and the community, although an inclusive formal communication forum has not been optimally established. Exchange of resources, trust, and personal relationships are key to strengthening synergy between stakeholders. However, limited trader capacity, minimal community involvement, and low private sector roles are challenges in creating adaptive and participatory governance. This study recommends the establishment of regular communication forums, increasing trader assistance, and encouraging multi-actor partnerships as strategic steps to improve sustainable tourism area governance.

Keywords : actor network, governance, tourism traders, Kenjeran Beach, Surabaya

*Corresponding author

E-mail addresses: rizaldof7@gmail.com



PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Kota Surabaya, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, juga mengembangkan sektor pariwisata sebagai bagian dari strategi pembangunan kota. Salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi ekonomi dan sosial yang cukup menonjol adalah kawasan wisata Pantai Kenjeran. Pantai Kenjeran tidak hanya menawarkan keindahan alam, namun juga menjadi pusat aktivitas perdagangan wisata yang melibatkan berbagai pelaku usaha lokal. Keberadaan pedagang wisata, baik dalam bentuk Pedagang, kios makanan, penjual suvenir, maupun jasa rekreasi lainnya, turut menopang daya tarik kawasan serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Namun demikian, perkembangan aktivitas perdagangan wisata di kawasan ini juga memunculkan berbagai tantangan dalam tata kelola kawasan, seperti persoalan penataan ruang, legalitas usaha, kebersihan lingkungan, ketertiban, serta potensi konflik antar pelaku usaha.

Tata kelola pedagang wisata di kawasan Pantai Kenjeran melibatkan beragam aktor yang memiliki kepentingan, peran, dan pengaruh yang berbeda. Pemerintah daerah bertindak sebagai regulator, UPTD sebagai pelaksana teknis, asosiasi pedagang sebagai representasi pelaku usaha, serta masyarakat lokal dan wisatawan sebagai penerima dampak langsung. Kompleksitas ini menuntut kolaborasi antaraktor agar kebijakan yang diambil dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Kompleksitas permasalahan yang muncul menuntut adanya koordinasi dan sinergi antar aktor dalam rangka menciptakan tata kelola yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Proses kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga sangat bergantung pada interaksi antaraktor serta dinamika implementasi yang terjadi di lapangan. Sebagian pedagang enggan menempati kios baru karena dianggap tidak strategis, sehingga mereka memilih berjualan di luar area resmi. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan dan menciptakan ketidakteraturan tata ruang pasar. Dalam konteks ini, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi sangat penting. Berbagai studi menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kekuatan jejaring aktor yang terlibat di dalamnya (Azizah, 2019).

Pengelolaan pedagang wisata tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai aktor yang terhubung dalam satu jaringan kebijakan. Para aktor ini berinteraksi, bernegosiasi, bahkan berkompetisi dalam mempengaruhi arah kebijakan pengelolaan kawasan. Jaringan aktor tersebut meliputi unsur pemerintah, pelaku usaha lokal, pengelola kawasan, hingga kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan aktivitas perdagangan wisata. Interaksi antar aktor ini membentuk dinamika yang menentukan bagaimana pedagang wisata diatur, difasilitasi, dan dikembangkan. Pentingnya untuk mengkaji lebih dalam bagaimana jaringan aktor kebijakan bekerja dalam konteks tata kelola pedagang wisata di Pantai Kenjeran. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan, pola kerja sama, serta kepentingan antar aktor dapat memengaruhi kebijakan yang diterapkan di lapangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model tata kelola yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam mendukung kehidupan ekonomi masyarakat di kawasan wisata.

Pengelolaan kota yang efektif serta pemanfaatan alih fungsi lahan yang optimal dapat memberikan dampak positif pada berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi. Melalui penerapan tata kelola kota dan pemanfaatan alih fungsi lahan dalam bentuk pembangunan, terjadi perubahan yang signifikan. Pembangunan sendiri dapat dimaknai secara beragam oleh



setiap individu. Namun, secara umum terdapat kesepahaman bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang mendorong terjadinya perubahan. (Digdowiseiso, 2019)

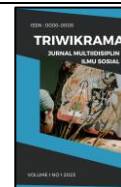
Prinsip tata kelola dan hubungan antar aktor pelaksana industri pariwisata tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dengan upaya dalam mengungkapkan siapa saja aktor yang terlibat dan seberapa penting peran aktor tersebut. Studi tentang jaringan aktor mulai banyak digunakan dalam perkembangan keilmuan sosial termasuk pada sektor pariwisata. Namun, dari beberapa pencarian literatur ataupun penelitian, penelitian terkait jaringan masih sangat sedikit yang mengulas aktor-aktor yang berpengaruh dalam industri pariwisata di Kabupaten Kuningan. Studi mengenai hubungan pentahelix serta hubungan pemerintah dan masyarakat selama pandemi COVID-19 mengungkapkan betapa pentingnya bagi para pemangku kepentingan yang memahami masalah di sektor pariwisata untuk membangun komunikasi dengan masyarakat mereka. (Rosshad et al., 2024)

Dengan adanya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan perubahan lingkungan hidup dengan pengelolaan efektif dan efisien untuk perlunya kebijakan tata kelola dengan mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan pelayanan publik membangun dengan secara berkelanjutan. Tantangan dapat dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, polusi, lingkungan, kemacetan lalu lintas, dengan kepanjangan dengan akses teknologi dalam mengatasi masalah dengan kebijakan tata kelola dengan harus berfokus peningkatan kualitas hidup masyarakat, efisiensi pemerintahan, pengembangan ekonomi masyarakat sekitar, pengembangan kelestarian lingkungan dan transparansi serta akuntabilitas dalam implementasinya, tata kelola Pedagang di Pantai Kenjeran Kota Surabaya masih menghadapi tantangan, seperti pertumbuhan yang tidak terkendali yang menimbulkan berbagai permasalahan, serta jaringan aktor yang terlibat, tidak hanya pemerintah, tetapi juga dan asosiasi Pedagang. Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan penataan Pedagang di Pantai Kenjeran Kota Surabaya diperlukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, yang dapat memberikan wawasan tentang pendekatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan UMKM di tingkat daerah. (Ananda, 2018)

LANDASAN TEORI

Teori Governance

Menurut (Pierre & Peters, 2020) governance menggambarkan pergeseran dari model pemerintahan tradisional (government) yang berpusat pada dominasi negara, menuju model yang lebih kolaboratif. Dalam kerangka ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor pengambil keputusan, tetapi berperan sebagai fasilitator yang menjalin kerja sama dengan berbagai aktor lain, seperti masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, dan kelompok kepentingan lainnya. Dalam konteks pengelolaan pedagang, pergeseran ini menandakan bahwa pengaturan dan penataan tidak lagi hanya melalui pendekatan represif seperti penertiban, tetapi juga melalui pendekatan partisipatif dan dialogis yang mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, serta kebutuhan warga kota, khususnya para pelaku ekonomi kecil. Beberapa aspek penting dalam isu tentang pedagang antara lain ketidakpastian legalitas dan perizinan, di mana pedagang sebagai bagian dari sektor informal berperan penting dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun, banyak pedagang masih beroperasi tanpa izin resmi akibat keterbatasan akses informasi, tingginya biaya perizinan, dan belum optimalnya fasilitasi pemerintah kota, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap penertiban atau pengusuran sewaktu-waktu. Penertiban dan pengusuran sendiri umumnya didasarkan pada alasan menjaga ketertiban umum dan estetika kota, namun di sisi lain menimbulkan konflik sosial serta mengganggu keberlangsungan mata



pencaharian pedagang, yang kerap menghadapi stigma negatif dari sebagian masyarakat, terutama kelas menengah perkotaan yang memandang mereka sebagai penyebab kemacetan, ketidakrapihan, atau penurunan kualitas ruang publik. Kebijakan penataan kota yang tidak inklusif turut memperparah kondisi ini, sebab banyak ruang publik yang menjadi lokasi usaha pedagang dialihfungsikan menjadi area komersial, taman kota, atau zona pedestrian tanpa disertai solusi pemindahan yang layak, sehingga mencerminkan ketimpangan prioritas pembangunan kota yang lebih berpihak pada estetika dan investasi ketimbang perlindungan hak ekonomi warga miskin kota. Selain itu, tata kelola pedagang di banyak kota, termasuk Surabaya, masih bersifat top-down dan minim pelibatan komunitas pedagang itu sendiri, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan memicu resistensi. Oleh sebab itu, solusi atas persoalan ini tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan penertiban semata, tetapi memerlukan kebijakan yang lebih adil, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan tata kelola kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Teori Network Governance

Network governance merupakan bentuk tata kelola yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor berbeda dalam proses implementasi kebijakan atau penyelenggaraan layanan publik. Melalui jejaring ini, pemerintah dapat mengatasi keterbatasan sumber daya sekaligus memperluas jangkauan kebijakan, karena berbagai aktor bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut (Rhodes, 2017) terdapat enam variabel penting dalam network governance, yaitu pertama, interdependensi antarorganisasi, di mana setiap aktor dalam jaringan saling membutuhkan untuk meraih tujuan bersama sehingga kerja sama menjadi sebuah keharusan; kedua, pertukaran sumber daya, yang menunjukkan bagaimana aktor dalam jaringan saling memberi dan menerima sumber daya seperti informasi, dana, kekuasaan, dan legitimasi, menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan; ketiga, komunitas kebijakan, yakni kelompok aktor yang secara rutin terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu melalui interaksi kolaboratif dan partisipatif; keempat, kepercayaan dan hubungan personal antaraktor yang menjadi landasan utama untuk membangun jejaring yang stabil dan efektif, karena kepercayaan mampu meminimalkan konflik serta meningkatkan koordinasi; kelima, perubahan fungsi eksekutif inti yang bertransformasi menjadi fasilitator atau mediator antaraktor dalam jaringan; dan keenam, ketiadaan pemerintah sebagai aktor tunggal, karena fungsi-fungsi pemerintahan kini tersebar ke berbagai sektor seperti swasta dan organisasi masyarakat. Dengan demikian, network governance menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan modern bergantung pada kolaborasi, kepercayaan, dan distribusi peran di antara beragam aktor, sehingga pemerintah bertransformasi menjadi pengelola jejaring yang memfasilitasi interaksi multipihak demi mencapai kepentingan publik secara lebih adaptif dan inklusif.

Model Pengembangan Pedagang Wisata

Dalam sistem pasar, keberadaan pembeli dan pedagang saling berkaitan, di mana pembeli berperan sebagai pihak yang menginginkan barang atau jasa untuk kemudian ditukar dengan uang sebagai alat pembayaran, sedangkan pedagang adalah pihak yang menjual barang secara langsung kepada pembeli (Damsar, 2002). Hubungan antara penjual dan pembeli bersifat timbal balik karena pembeli membutuhkan barang yang dijual oleh pedagang, sementara pedagang memperoleh penghasilan sebagai pengganti atas barang yang dibeli konsumen. Pedagang dapat dibedakan ke dalam beberapa golongan, antara lain pedagang distributor, pedagang besar, dan pedagang eceran. Pedagang distributor adalah pedagang yang memegang hak distribusi satu produk dari perusahaan tertentu untuk menyalurkan produk mereka ke pasar yang lebih luas melalui kontrak formal dan tidak memproduksi barang sendiri, melainkan hanya bertugas menyalurkan barang

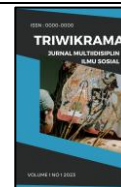


sebagai penghubung antara produsen dan pedagang besar atau eceran, misalnya produk kebutuhan pokok atau barang wisata. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli produk dalam jumlah besar untuk dijual kembali kepada pedagang lain seperti grosir, biasanya dengan skala usaha besar, dilengkapi gudang penyimpanan, dan jangkauan distribusi yang luas. Mereka berperan penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok dan menjadi sumber utama bagi pedagang eceran, termasuk menyuplai souvenir, makanan ringan, serta oleh-oleh di kawasan wisata. Sedangkan pedagang eceran adalah pelaku usaha yang langsung menjual barang kepada konsumen akhir dalam jumlah kecil, dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat maupun wisatawan, dengan ciri usaha berlokasi dekat konsumen, modal relatif kecil hingga menengah, pelayanan langsung, dan variasi produk yang menyesuaikan kebutuhan lokal. Secara umum, pedagang berperan penting dalam sistem pasar sebagai penyedia barang atau jasa yang dibutuhkan pembeli melalui mekanisme pertukaran barang dan uang, serta memiliki perbedaan fungsi tergantung jalur distribusi yang digunakan. Lebih lanjut, dalam perspektif sosiologi ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh Geertz, Mai, dan Buchholtz dalam (Damsar, 2002) pedagang juga diklasifikasikan berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan dari hasil perdagangan serta hubungannya dengan ekonomi keluarga. Pedagang profesional adalah mereka yang menjadikan berdagang sebagai pekerjaan utama dengan keahlian khusus, orientasi keuntungan ekonomi, pengalaman, modal memadai, serta strategi usaha jangka panjang yang terencana. Pedagang semi profesional menjadikan kegiatan berdagang sebagai salah satu sumber pendapatan, namun belum sepenuhnya bergantung padanya, biasanya memiliki keterampilan dasar berdagang tetapi belum cukup modal atau strategi usaha jangka panjang. Pedagang subsistensi menjalankan usaha hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam skala terbatas tanpa orientasi bisnis berkelanjutan, umumnya beroperasi di sektor informal dengan pendapatan rendah, rentan terhadap kebijakan pemerintah atau persaingan pasar. Sedangkan pedagang semu adalah mereka yang beraktivitas berdagang secara tidak konsisten, bersifat sementara, atau hanya sebagai kedok untuk kegiatan lain tanpa orientasi usaha yang jelas. Pembagian ini menunjukkan bahwa setiap kategori pedagang memiliki karakteristik penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang berbeda, yang berimplikasi pada pola ekonomi rumah tangga serta posisi mereka dalam struktur ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, tantangan, serta interaksi para aktor dalam tata kelola pedagang wisata di kawasan Pantai Kenjeran, Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para pihak yang terlibat, guna menggali dinamika, kendala, serta nilai-nilai sosial yang mempengaruhi proses tata kelola. Penelitian kualitatif menekankan interpretasi fenomena secara kontekstual, dengan mempertimbangkan latar sosial, budaya, serta interaksi antaraktor, sehingga hasil penelitian tidak bersifat generalisasi tetapi mendalam sesuai konteks lokal (Sugiyono, 2018).

Fokus penelitian ini merujuk pada teori network governance (Rhodes, 2017) yang diterapkan pada konteks pedagang wisata Pantai Kenjeran. Enam fokus utama penelitian dirumuskan sebagai berikut: Interdependensi antarorganisasi dalam jaringan pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Pertukaran sumber daya antaraktor berupa informasi, dana, kekuasaan, dan legitimasi. Pembentukan komunitas kebijakan yang berinteraksi secara rutin dalam proses perumusan kebijakan. Kepercayaan dan hubungan personal antaraktor sebagai



fondasi jejaring yang stabil. Pergeseran peran pemerintah dari aktor dominan menjadi fasilitator dalam tata kelola horizontal. Hilangnya peran pemerintah sebagai aktor tunggal, digantikan distribusi peran ke berbagai sektor lain. Keenam fokus ini menjadi kerangka untuk memahami dinamika jaringan tata kelola pedagang wisata di kawasan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber utama data berasal dari ucapan dan tindakan manusia, yang kemudian dilengkapi dengan berbagai data pendukung seperti dokumen dan sumber lainnya. Secara umum, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau langsung dari pihak yang bersangkutan. Data ini dikumpulkan dengan tujuan untuk menjawab fokus permasalahan dalam penelitian, dan dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan maupun melalui observasi langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Sementara itu, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak kedua. Sumber ini meliputi dokumen tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan, serta informasi dari internet. Data sekunder berfungsi sebagai penunjang data primer dalam proses analisis dan interpretasi hasil penelitian.

Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan merupakan sumber data utama, sedangkan dokumen dan bentuk data lainnya berfungsi sebagai pelengkap. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang digunakan secara terpadu untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang dikumpulkan. Pada dasarnya, keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada kualitas dan kredibilitas data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beragam teknik pengumpulan data secara bersamaan guna memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

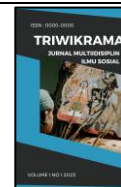
Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020) melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data lapangan agar lebih terstruktur dan bermakna. Selanjutnya, penyajian data disusun dalam bentuk uraian narasi, bagan, foto, maupun tabel untuk memudahkan pemahaman terhadap gambaran keseluruhan dinamika jaringan tata kelola pedagang wisata. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian agar interpretasi data tetap valid dan relevan dengan fokus penelitian. Narasumber penelitian dirangkum sebagai berikut: dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata sebagai staf pelaksana teknis untuk memperoleh informasi kebijakan pengelolaan kawasan wisata dan UMKM; Kepala UPTD THP Kenjeran untuk mendalami strategi pengelolaan teknis kawasan wisata termasuk penataan pedagang; staf pelaksana Satpol PP untuk memahami penegakan peraturan dan tantangan penertiban pedagang; pelaku usaha wisata sebagai informan utama terkait pengalaman dan persepsi penataan kebijakan; serta masyarakat sekitar yang dipilih untuk menangkap perspektif tentang dampak sosial, ekonomi, dan ruang akibat aktivitas pedagang di Pantai Kenjeran.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Interdependensi Antar Organisasi



Dalam Interdependensi Antar Organisasi sebagai Pengambil kebijakan utama dan penanggung jawab program pengembangan. UPTD Unit pelaksana teknis dari dinas yang mengelola langsung operasional, Satpol PP Menjaga ketertiban dan keamanan namun masyarakat yang terdampak langsung yang dibutuhkan di pantai kenjeran terjadi banyak faktor saling mempengaruhi dengan kebijakan pola dan hasilnya yang dapat dijalankan. Interdependensi untuk mengacu berbagai peran aktor yang terlibat dalam upaya penataan dan pengembangan Pedagang Kali Lima pada destinasi wisata pantai kenjeran.

Menurut Ibu Tutut selaku staff Dinas Pariwisata Kota Surabaya mengatakan

“Dinas pariwisata memiliki peran untuk pengembangan, dalam pengelolaan pada pedagang. Pihak dari dinas juga memastikan kenyamanan dan ketertiban kawasan daik fasilitas maupun aktivitas ekonomi. Lalu untuk aturan pedagang di daerah pantai kenjeran agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk pedagang selalu koordinasi untuk memberi arahan dalam pembinaan kepada pedagang agar mengikuti aturan tata kelola yang telah disepakati. Kami berkoordinasi dengan Satpol pp, uptd thp kenjeran, namun semua saling mendukung untuk menata kawansan pantai kenjeran. Terkait satpol pp juga berperan dalam aturan. Kami sering koordinasi dengan jadwal pengawasn dan penertiban, jika ada pelanggaran dari pihak satpol pp sudah memberi peringatan. Namun untuk kedepan direncanakan untuk setiap pedagang memiliki lokasi yang jelas dan secara resmi. Hal ini untuk bertujuan mengurangi konflik pada pedagang, agar tidak muncul pedagang tidak taat aturna yang tidak tertata.”

Hasil wawancara Dinas Pariwisata berperan dalam pengembangan dan pengelolaan pedagang di Pantai Kenjeran dengan menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keteraturan kawasan. Dinas rutin melakukan pembinaan, berkoordinasi dengan Satpol PP dan UPTD THP Kenjeran untuk pengawasan serta penertiban. Ke depan, setiap pedagang direncanakan menempati lokasi resmi guna mencegah konflik dan pedagang liar.

Sementara itu, Satpol PP Kota Surabaya memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan Perda di kawasan wisata. Satpol PP tidak bertindak secara independen, melainkan bergantung pada koordinasi dengan UPTD dan Dinas Pariwisata. Hal ini ditegaskan oleh Bapak A.S, petugas lapangan Satpol PP Kenjeran:

“Kami juga berperan menjaga ketertiban umum dan menegakkan Perda. Untuk urusan pedagan, saya jugaselalu berkoordinasi dengan pihak dinas dan pihak pantai. Ketika ada pelanggaran, misalnya dengan pedagang berjualan di luar zona yang ditentukan, kami melakukan penertiban dengan ngobrol secara baik. Satpol ppjuga tidak bekerja sendiri. Kerja sama juga baik dengan uptd dan dinas pariwisata”

Pernyataan in menegaskan bahwa dalam konteks penataan pedagang wisata pantai kenjeran, Satpol PP sangat bergantung pada dukungan data, informasi, dan pendekatan awal dari UPTD maupun Dinas Pariwisata. Sinergi ini menunjukkan adanya pola relasi timbal balik atau interdependensi yang kuat antar aktor dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Dalam proses penataan dan pengelolaan pedagang di kawasan wisata Pantai Kenjeran, berbagai aktor kebijakan saling berinteraksi dan membangun interdependensi dalam menjalankan peran masing-masing. Salah satu aktor teknis di lapangan adalah UPTD Tempat Hiburan Pantai (THP) Kenjeran, yang menjadi ujung tombak pengawasan operasional sehari-hari. Menurut Bapak I.R selaku Kepala UPTD THP Pantai Kenjeran dari dinas disbudporapar mengatakan:

“Untuk selama ini UPTD kenjeran melakukan pantauan langsung di lapangan untuk memastikan para pedagang berjualan sesuai aturan. Secara lapaka, Kebersihan semua kami awasi. UPTD juga sebagai penghubung pedagang yang memiliki keluhan ataupun permasalahan, untuk pengaduan diteruskan ke Dinas Pariwisata agar ditindaklanjuti, Pada ketertiban juga



berkoordinas pada Satpol PP, namun jika ada pelanggaran pedagang lain tanpa izin. Satpol PP juga memberikan teguran atau penindakan, pada pihak UPTD sosialisasi dahulu agar tidak menimbulkan ketegangan dengan pedagang. Untuk dinas juga melakukan menjaga kebersihan. Aturan, dan kenyamanan. Dengan adanya penataan lokasi lebih jelas dan resmi agar bisa segera terealisasi sehingga pedagang agar tertata rapi.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa UPTD THP Kenjeran berperan penting dalam memastikan ketertiban operasional di lapangan. UPTD juga menjadi penghubung komunikasi antara pedagang dan Dinas Pariwisata, serta berkolaborasi dengan Satpol PP dalam upaya penegakan aturan. Pendekatan persuasif menjadi strategi utama dalam membina pedagang agar dapat patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan penataan kawasan wisata dapat berjalan secara kondusif.

Selain pemerintah dan pelaksana teknis, masyarakat sebagai pihak yang langsung merasakan dampak dari pengelolaan di Pantai Kenjeran juga menjadi aktor penting yang terlibat secara tidak langsung dalam jaringan kebijakan ini. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan pak D.A selaku masyarakat di pantai kenjeran mengatakan :

“Saya sebagai warga sekarang tertata dulu pedagang kadang seenaknya dengan membuka lapak dipinggir jalan namun untuk jalanan sempit dan kotor. Tapi sekarang tersusun lebih rapi, pedagang sudah mempunyai tempatnya. Untuk ketua pantai kenjeran seirng melihat. Namun ada juga pedagang yang buka dipinggir jalan, apalagi hari libur. Saya berharap kedepanya penataan agar lebih ketat supaya masyarakat, dan pedagang juga punya tempat yang jelas, agar semua bisa diuntungkan

Berdasarkan hasil wawancara penataan di Pantai Kenjeran mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dari sisi kenyamanan, keteraturan, dan kebersihan kawasan. Masyarakat juga melihat adanya interaksi nyata antara UPTD, Satpol PP, dan pedagang dalam menjaga keteraturan di lapangan. Meski demikian, masih terdapat tantangan terkait konsistensi pengawasan terutama saat kunjungan wisata meningkat.

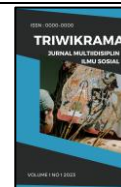
Pertukaran Sumber Daya

Dalam Pertukaran Sumber Daya sebagai bagian dari proses kebijakan, terdapat berbagai kepentingan dan kebutuhan yang saling berinteraksi. Setiap aktor memiliki sumber daya tertentu, baik berupa kewenangan, informasi, Pertukaran sumber daya ini menjadi bagian penting dalam upaya penataan dan pengembangan Pedagang pada destinasi wisata Pantai Kenjeran. Kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aktor-aktor mampu melakukan negosiasi, berbagi sumber daya, dan menjalin hubungan timbal balik untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam pelaksanaan program penataan dan pengembangan di kawasan Pantai Kenjeran, Dinas Pariwisata Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tutut selaku staf Dinas Pariwisata Kota Surabaya

“Kami di Dinas Pariwisata bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta penyediaan fasilitas pendukung di kawasan Pantai Kenjeran. Sumber daya yang kami kelola meliputi anggaran untuk pembinaan pedagang, penataan lokasi, serta pengembangan wisata. kami juga mengelola data pedagang, memastikan mereka terdaftar secara resmi, dan memberikan pembinaan secara rutin agar mereka mengikuti aturan yang telah ditetapkan.”

Dinas Pariwisata berperan penting dalam pengelolaan di Pantai Kenjeran melalui pengelolaan anggaran pembinaan, penataan lokasi, dan pengembangan sarana wisata. Selain



mengelola data pedagang resmi, Dinas secara rutin melakukan pembinaan untuk memastikan mematuhi aturan, menjaga kebersihan, keteraturan, dan pelayanan yang baik bagi wisatawan. Melalui pengelolaan sumber daya ini, diharapkan Pantai Kenjeran menjadi destinasi wisata yang nyaman, tertib, dan tetap memberikan ruang usaha bagi secara teratur.

Menurut perkataan dari Bapak I.R selaku Kepala UPTD Pantai Kenjeran mengatakan:

“Kalau untuk memberikan dukungan dana tidak ada, kami dari uptd melakukan promosi, tetapi untuk fasilitas dikasih terkait meja makan dan gazebo. Jadi memang untuk saat ini memang pedagang belum tersupport terkait dengan dinas. Terkait sumber daya manusia, ya jadi untuk pengembangan pada pedagang pantai kenjeran mungkin sebenarnya dibutuhkan tetapi menurut kami tidak hanya sumber daya, khususnya dalam hal sumber daya manusia. Karena memang dibutuhkan adalah pelatihan, kemudian juga pembinaan pada sumber daya manusia yang berada di pantai kenjeran, termasuk juga sebagai sumber daya manusia pedagang yang mereka berjualan atau mempunyai usaha itu sebenarnya penting untuk pengembangan di pantai kenjeran. Namun di sumber daya manusia dan pedagang juga mempunyai usaha. Untuk pihak swasta kami memang belum ada kerja sama ya. jadi termasuk dengan dinas koperassi, pedagang juga hanya sebatas sharing dan melakukan wawancaara untuk melakukan lapangan sendiri. Namun secara tanggung jawab perdangan di pantai kenjeran dibawah naungan BPD di pengelola tujuan.”

Hasil dari wawancara Para pedagang di Pantai Kenjeran belum mendapatkan dukungan memadai dalam bentuk dana, promosi, fasilitas, maupun pengembangan SDM dari dinas terkait. Program pelatihan dan pembinaan bagi pedagang masih minim dan belum berjalan optimal. Kerja sama dengan pihak swasta pun belum terjalin, sementara interaksi dengan Dinas Koperasi sebatas pengumpulan data tanpa pendampingan konkret. Secara kelembagaan, pengelolaan pedagang berada di bawah Badan Pengelola Daerah (BPD) selaku pengelola kawasan wisata.

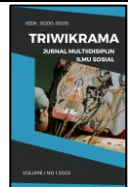
Menurut pernyataan tersbut didukung oleh wawancara dengan Pak A.S selaku satpol PP yang ada di kawasan pantai kenjeran :

“Pihak Satpol PP tidak bekerja sendiri. Ada kerja sama yang baik dengan UPTD dan dinas pariwisata. Biasanya kami akan mendapatkan laporan atau hasil pantauan dai UPTD dan kami mengecek untuk tindak lanjuti bila perlu”

Satpol PP menukar kewenangan penindakan yang dimilikinya dengan informasi dan dukungan koordinatif dari aktor lain. Pertukaran ini menjadi krusial agar tindakan yang dilakukan memiliki dasar dan tidak menimbulkan resistensi sosial yang tinggi.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan pak F.I selaku pedagang di pantai kenjeran mengatakan :

“Ya pernah sih dapat bantuan fasilitas dari UPTD, Kalau ada rapat atau pertemuan antar pedagang, saya biasanya dapat undangan dari kelurahan atau dinas. Saya dan teman-teman sesama pedagang juga sering kerja bakti bareng buat bersihin lapak, biar tempatnya rapi, pembeli juga senang. Kami juga bersyukur bisa jualan di situ karena udah diizinkan. Tapi ya, bantuan dari pemerintah itu kadang nggak semua dapat. Saya pernah dapat, tapi teman saya ada yang nggak kebagian karena harus daftar dan prosesnya agak ribet. Kadang juga info soal bazar atau acara tertentu saya tahunya dari teman, bukan dari kelurahan langsung. Bantuan itu memang membantu banget, cuma belum merata dan nggak rutin.”



Pedagang di THP Kenjeran telah menerima berbagai bentuk dukungan dari pemerintah, seperti fasilitas dari UPTD, serta partisipasi dalam kegiatan kebersihan dan pendataan. Namun, bantuan yang diberikan belum merata dan informasinya kadang tidak tersampaikan secara langsung, sehingga sebagian pedagang merasa kurang terjangkau oleh program yang ada. Meskipun demikian, pedagang tetap menunjukkan sikap kooperatif dan bersyukur atas kesempatan berjualan di lokasi tersebut.

Komunitas Kebijakan

Dalam menjalankan konsep komunitas kebijakan merujuk pada kelompok aktor yang terlibat, untuk memiliki untuk kepentingan, dan berpengaruh dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan tertentu. Pada komunitas ini bukan hanya dari aktor pemerintah, yang memiliki pengetahuan, Sumber daya, dan pengenalan dari masyarakat yang terjadi.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan bu T.T selaku Dinas Pariwisata :

“Kami dari Dinas Pariwisata tidak langsung menangani penertiban , tapi tetap memberikan masukan, seperti soal penataan lokasi jualan dan jam operasional agar tidak mengganggu wisatawan. Sampai sekarang belum ada forum resmi yang mempertemukan semua pihak seperti dinas, pedagang, dan masyarakat. Komunikasi biasanya hanya dilakukan menjelang event atau penataan kawasan. Ke depan, kami harap ada forum komunikasi rutin dan terstruktur agar koordinasi bisa lebih efektif dan menyeluruh.”

Dalam hal pengelolaan Pedagang di pantai kenjeran Surabaya yang terdapat pada komunitas kebijakan di pantai kenjeran . Menurut Bapak I.R selaku Kepala UPTD Pantai Kenjeran mengatakan:

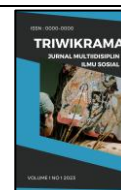
“Saat ini belum ada forum formal yang rutin mempertemukan semua aktor seperti dinas, ,pelaku wisata, dan masyarakat. Namun, koordinasi tetap dilakukan secara tematik, terutama menjelang event atau penataan kawasan, biasanya melalui koordinator atau tokoh masyarakat. Efektivitas koordinasi masih terbatas karena bersifat teknis dan jangka pendek, belum sampai menyatukan visi jangka panjang. Dinas Pariwisata berperan memberi masukan dalam penataan, seperti lokasi strategis dan jam operasional, agar tidak mengganggu alur wisatawan. Ke depan, diperlukan forum komunikasi yang lebih rutin dan terstruktur.”

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala uptd Hingga saat ini, belum terbentuk forum resmi yang secara berkala mempertemukan seluruh pemangku kepentingan seperti dinas terkait, pedagang wisata pantai kenjeran pelaku pariwisata, dan masyarakat. Meski begitu, koordinasi tetap berlangsung dalam bentuk tematik, terutama menjelang pelaksanaan kegiatan atau penataan kawasan, biasanya melalui koordinator atau tokoh masyarakat. Namun, koordinasi ini masih bersifat teknis dan jangka pendek, belum mengarah pada penyelarasan visi jangka panjang. Dinas Pariwisata turut berkontribusi dengan memberikan arahan mengenai pengaturan posisi dan waktu operasional agar tidak mengganggu arus wisatawan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan wadah komunikasi yang lebih rutin, inklusif, dan terorganisir untuk mendukung pengembangan kawasan secara berkelanjutan.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan pak A.S selaku Satpol PP di lapangan pantai kenjeran :

“Penindakan tidak dapt melakukan secara sepihak. Setiap Langkah selalu didasarkan pada laporan dari UPTD atau hasil koordinasi dengan dinas pariwisata. Kami juga berupaya agar penertiban dapat dilakukan dengan tertib dan tanpa masalah”

Berdasarkan hasil, Satpol PP kenjeran tidak bertindak secara mandiri dalam proses penindakan terhadap , melainkan selalu berkoordinasi dengan UPTD dan Dinas Pariwisata sebagai bagian dari prosedur yang terstruktur. Pendekatan yang digunakan cenderung mengedepankan koordinasi dan upaya persuasif guna menghindari konflik di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa peran



Satpol PP dalam jaringan kebijakan bersifat kolaboratif, bukan represif, serta menekankan pentingnya sinergi antaraktor dalam menjaga ketertiban kawasan wisata secara kondusif. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan pak F.I selaku Pedagang di pantai Kenjeran mengatakan :

“Selama ini saya berkoordinasi salah satu Pedagang. Kalau ada masalah, seperti penataan lapak atau kebersihan, ya saya ngobrol bersama koordinator. Dengan adanya masalah berkaitan dengan dinas, seperti izin usaha atau razia, kami bingung harus lapor ke siapa. Karena memang nggak ada forum resmi yang mempertemukan semua pihak. Ya selain penataan lapak, kami sebenarnya butuh pembinaan usaha juga. Misalnya ada pelatihan bagaimana mengelola usaha, pemasaran, atau bahkan bantuan modal. Selama ini kan baru sebatas pengaturan lokasi jualan saja, belum ada program yang betul-betul membantu pengembangan usaha kami. Kalau ada masalah, kan bisa cepat dicarikan solusinya. Sekarang ini biasanya baru ketemu kalau ada acara besar atau penataan kawasan saja. Padahal, kalau ada forum rutin, kan bisa saling tukar pendapat sejak awal, bukan setelah masalah muncul. Kami sebagai pedagang juga ingin punya suara dan bisa ikut membangun.”

Pedagang menyatakan bahwa selama ini koordinasi hanya bersifat informal dengan koordinator pedagang, terutama terkait penataan lapak dan kebersihan. Ketika menghadapi masalah yang melibatkan dinas lain, seperti perizinan atau razia, mereka bingung karena tidak ada forum resmi yang mempertemukan semua pihak. Pedagang juga berharap ada pembinaan usaha, seperti pelatihan pengelolaan usaha, pemasaran, dan bantuan modal, agar pengembangan usaha tidak hanya sebatas pengaturan lokasi jualan.

Dengan adanya forum antara pemerintah, pedagang dan masyarakat untuk membahas pengelolaan Pedagang lebih mudah. Menurut pak D.A selaku masyarakat sekitar.

“eeh untuk saat ini mas dari warga, saya belum pernah mendengar adanya rapat untuk pertemuan dan melibatkan warga, pemerintah dan pedgaang, untuk membahas pengelolaan pedagang. Warga juga mengikuti perkembangan hanya mengetahui melalui berita dan cerita sesama warga. Saya sebagai warga belum pernah diundang untuk diskusi dengan penataan kawasan pada keberadaan pedagang pada lingkungan sekitar. Warga juga terdampak pada aktivitas tersebut, baik dalam bentuk kemacetan, kebersihan maupun kenyamanan wisata. Berharap juga saya untuk melibatkan warga sekitar.”

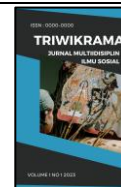
Berdasarkan hasil wawancara, bahwa masyarakat sekitar belum dilibatkan secara aktif dalam forum atau pertemuan secara resmi yang membaha aturan maupun pengelolaan Pedagang. Masyarakat tidak pernah diundang dalam proses diskusi atau musyawarah bersma pemerintah dan pedagang, meskipun ikut juga terdampak langsung keberadaan dan aktivitas pedagang sekitar.

Kepercayaan dan Hubungan Personal

Proses network governance dengan kepercayaan dan hubungan personal dalam aspek penting yang menentukan efektivitas dala kolaborasi antaraktor. Hubungan yang dapat dibangun pada kepercayaan cenderung menghasilkan koordinasi yang lebih, dan stabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.

Pernyataan teresebut didukung oleh hasil wawancara dengan bu T.T selaku Dinas Pariwisata:

“Kami memahami bahwa dalam pengelolaan kawasan wisata seperti Pantai Kenjeran, kedekatan personal antara pedagang, masyarakat, dan pihak pengelola memang sangat memengaruhi dinamika di lapangan. Tapi kami juga harus tetap menjunjung asas keadilan dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, semua bentuk kerja sama tetap harus mengikuti



regulasi seperti Perda dan SOP yang berlaku. Dinas tentu tidak ingin hanya mengatur dari kantor saja. kami justru mendorong pendekatan yang lebih aktif, dengan turun langsung ke lapangan agar bisa mendengar langsung aspirasi masyarakat maupun pedagang. Hubungan yang baik memang penting, tapi juga harus diiringi dengan profesionalitas dan akuntabilitas.”

Dinas Pariwisata menyadari pentingnya kedekatan personal dalam pengelolaan kawasan wisata, namun menekankan bahwa hubungan tersebut harus tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku. Kerja sama yang baik perlu diimbangi dengan profesionalisme, transparansi, dan keterlibatan aktif di lapangan agar pengelolaan berjalan adil dan akuntabel.

Dalam konteks tata kelola pedagang antar aktor untuk mempengaruhi kelancaran pada pantai kenjeran Menurut Bapak I.R selaku Kepala UPTD Pantai Kenjeran mengatakan:

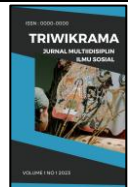
“Pengembangan di pariwisata Taman Hiburan Pantai Kenjeran bersifat lintas sektor, sehingga kerja sama dengan dinas lain seperti DPRKPP (Dinas Cipta Karya) sangat penting, terutama dalam hal revitaliasi fisik dan penambahan sarana. Hubungan antar instansi dibangun atas dasar kepercayaan, karena pariwisata tidak bisa dijalankan oleh satu Dinas saja. Misalnya, perbaikan infrastruktur seperti loke atau saluran air menjadi tanggung jawab dinas teknis terkait, bukan hanya Disbuporapar. Sementara itu juga, hubungan UPTD dengan pedagang di Kawasan pantai kenjeran sudah cukup lama terjalin, dengan komunikasi dua arah yang harus terus terjaga. Pedagang diberikan informasi dan direspon keluhanya, terutama terkait dengan SPK dan proses sewa lahan, yang diatur melalui Perda No. 7 Tahun 2023. Dengan tantangan khususnya menyangkut kesadaran dan kedisiplinan sumber daya manusia pedagang itu sendiri. UPTD tetap berupaya membangun hubungan yang baik, mengingat seberapa besar pedagang merupakan warga sekitar.”

Berdasarkan hasil wawancara kepala uptd pantai kenjeran pengelolaan dan pengembangan wisata di Taman Hiburan Pantai Kenjeran bersifat lintas sektor, sehingga dibutuhkan sinergi antar instansi, seperti kerja sama dengan Dinas Cipta Karya dalam melakukan revitalisasi fisik dan penambahan sarana pendukung. Kerja sama ini dibangun atas dasar kepercayaan, karena sektor pariwisata tidak dapat dijalankan oleh Disbudporapar saja. Misalnya, perbaikan saluran air atau infrastruktur fisik lainnya menjadi tanggung jawab dinas teknis terkait. Di sisi lain, hubungan antara UPTD dan para pedagang di kawasan pantai telah lama terbentuk dan berlangsung melalui komunikasi dua arah, terutama dalam hal penyampaian informasi terkait SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama) dan proses sewa lahan yang diatur lewat Perda No. 7 Tahun 2023. Tantangan yang dihadapi lebih banyak berkaitan dengan perilaku pedagang, khususnya dalam hal kedisiplinan dan kesadaran mereka sebagai pelaku usaha. Meski begitu, UPTD tetap berusaha menjalin relasi yang harmonis, apalagi mayoritas pedagang adalah warga sekitar kawasan.

Pendapat yang diberikan pada masyarakat dalam hubungan pihak lain menurut pak D.A mengatakan :

“Usaha Masyarakat lebih dipercaya karena tinggal dekat disini dekat pantai kenjeran dan memahami kondisi pedagang. Saya sebagai warga pada pedagang komunikasi sangat baik, saya bisa kerja sama, dan berbagi informasi pedagang dan warga saya melibatkan informasi. Namun, saya dan para pedagang juga dapat mempengaruhi siapa yang lebih diutamakan dalam kesempatan apapun. Pedagang juga berharap dinas harus sering turun lapangan langsung, tidak juga mengatur hanya dari kantor.”

Kedekatan antara masyarakat lokal dan pedagang di sekitar Pantai Kenjeran mendukung terciptanya kerja sama dan pertukaran informasi yang baik. Kepercayaan tumbuh karena warga memahami kondisi lapangan. Namun, kedekatan personal juga berpotensi menimbulkan



ketimpangan dalam pemberian kesempatan. Pedagang berharap dinas lebih aktif turun langsung ke lapangan, bukan hanya mengatur dari balik meja, agar pengelolaan lebih adil dan responsif.

Perubahan Fungsi Eksekutif Inti

Dalam analisis kebijakan jaringan, inti eksekutif adalah aktor-aktor kunci dalam pemerintahan yang memiliki kekuasaan utama dalam merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan. Dalam praktiknya, seiring dengan kompleksitas yang semakin meningkat dalam tata kelola dan kebutuhan akan kolaborasi lintas sektor, fungsi eksekutif inti mengalami perubahan atau perluasan.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan bu T.T selaku Dinas Pariwisata :

“Kalau dari Disbudporapar, kami lebih ke permusuan arah kebijaka umum pariwisata. Untuk dalam hal ini mengintergrasikan potensi kawasan kenjeran dengan kebijakan promosi, pengembangan event, dan branding. Tantanganya ada ada pada kesadaran pedagang, yang belum semuanya untuk menyesuaikan diri dengan kawasan wisata, Namun dengan pendekatan kolaboratif terus kami dorong.”

Fungsi dari dinas pariwisata dari pelaksan teknnis menjadi kebijakan dan fasilitator, dengan fokus pada koordinasi lintas sektor, promosi wisata, dan pengembangan event. Penanganan teknis di lapangan, termasuk pengelolaan pedagang diserahkan kepada UPTD. Namun tantangan utama yang dihadapi dengan kesadaran pedagang untuk menyesuaikan diri dalam standar kawasan wisata.

Dalam konteks tata kelola di pantai kenjeran terlihat adanya perubahan fungsi eksekutif inti terdapat adaptasi pada pendekatan pedagang dan masyarakat. Menurut Bapak I.R selaku Kepala UPTD Pantai Kenjeran mengatakan:

“untuk konteks pengelolaan Pedagang lebih banyak berperan sebagai pengarah dan fasilitator. Mereka memberikan arahan kebijakan, seperti penataan kawasan, pelaksanaan, atau pengembangan pada potensi. namun untuk pelaksanaan teknis di lapangan, itu biasanya menjadi tugas kami di UPTD kenjeran sebegaia pelaksana teknis. Namun dalam beberapa kegiatan, di pantai kenjeran menjalin hubungan dengan koordinasi lintas OPD, dan juga mengadakan event besar atau penataan lingkungan. Dengan secara umum dinas lebih diatas untuk kebijakan dan koordinasi, bukan pelaksana di lapangan. eh untuk melibatkan pedagang melalui media sosial pedagangnya ruwet. Karena di berbagai media sosial yang selalu diangkay kelebihan dari pedagang. dengan secara branding menggunkan media social pihak dari disbudporapar maupun UPTD dari Kerjasama dengan komunitas media sosial yang ada. Tinggal memang pola kesadaran dari pedagang di pantai kenjeran. Jadi untuk dinas melalui UPTD pengelola fasilitas sebenarnya bagaimana satu objek wisat sudah dipenuhi oleh pemerintah kota Surabaya. Namun dalam Disbudporapar melauai uptd difasiltasi seperti meja makan juga dalam hal apapun stan sudah difasilitasi.

Dalam pengembangan pariwisata, Disbudporapar berperan sebagai pengarah dan fasilitator, terutama dalam pelaksanaan event dan promosi wisata. Pelaksanaan teknis dilakukan secara lintas sektoral bersama UPTD dan dinas terkait, sementara infrastruktur ditangani oleh dinas lain. Fasilitas dasar dan upaya branding kuliner lokal telah disediakan dan didukung oleh berbagai pihak. Namun, tantangan utama terletak pada rendahnya kesadaran pedagang untuk menjaga keteraturan dan mendukung citra positif kawasan wisata.



Pendapat yang diberikan pada masyarakat dalam hubungan pihak lain menurut pak D.A mengatakan :

“Saya juga dapat informasi pemerintah juga UPTD lebih berperan sebagai pengarah dan fasilitator, seperti dalam penataan lapak, penyediaan sarana, serta promosi melalui media sosial. Namun, pelaksanaan teknis harian di lapangan tetap banyak dilakukan oleh pedagang sendiri. Kalau pemerintah sudah memfasilitasi berbagai kebutuhan fisik, pedagang merasa keterlibatan mereka dalam proses perumusan kebijakan dan penyelesaian masalah masih terbatas. Mereka berharap adanya forum komunikasi yang lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.”

Berdasarkan hasil dari wawancara pemerintah juga melalui UPTD lebih berperan sebagai pengarah dan fasilitator, seperti dalam penataan lapak, penyediaan sarana, serta promosi melalui media sosial. Namun, pelaksanaan teknis harian di lapangan tetap banyak dilakukan oleh pedagang sendiri. Kalau pemerintah sudah memfasilitasi berbagai kebutuhan fisik, pedagang merasa keterlibatan mereka dalam proses perumusan kebijakan dan penyelesaian masalah masih terbatas. Mereka berharap adanya forum komunikasi yang lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Ketiadaan Pemerintah Sebagai Aktor

Pemerintah berfungsi sebagai aktor utama dalam kebijakan jaringan , baik sebagai pengatur, penyedia fasilitas, maupun koordinator. Namun, dalam praktik di lapangan, sering kali terdapat kekurangan atau keterbatasan peran aktif pemerintah, baik secara langsung maupun dalam pengawasannya. Ini juga teridentifikasi dalam konteks pengelolaan pedagang di kawasan wisata Pantai Kenjeran, Kota Surabaya.

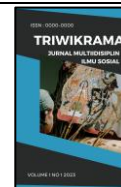
Dalam konteks tata kelola di pantai kenjeran terlihat adanya Ketiadaan pemerintah sebagai aktor terdapat adaptasi pada pendekatan pedagang dan masyarakat. Menurut Bapak I.R selaku Kepala UPTD Pantai Kenjeran mengatakan:

“Non pemerintah selama ini selama ini belum ada, tapi dala hal kerja sama sebagai CSR pemerintah kota Surabaya, ada bebrapa seperti contoh bank jatim. Tapi dalam hal peran penting dalam pengembangan wisata selama ini pemerintah belum ada dan memang ketika berbicaranya bahwa objek wisata yang berada di pantai kenjeran ini dikelola oleh dinas pariwisata melalui uptd . namun kita harus menyadari bahwa objek wisata taman pantai kenejra ini tidak semata mata mencari pendapatan. Namun pada pengelolaan di pantai kenjeran kami juga diundang rapat pada investor untuk mengelola pantai kenjeran. Untuk keterlibatan para pedagang juga sam saat ini sejauh itu sih banyak. Selama ini posisinya peran ini belum tergantikan karena memang selama ini uptd pantai kenjera tetap berad di bawa dinas pariwisata.”

Peran non-pemerintah dalam pengembangan Pantai Kenjeran masih minim, hanya terbatas pada kerja sama CSR seperti dengan Bank Jatim. Pengelolaan kawasan sepenuhnya dipegang oleh Dinas Pariwisata melalui UPTD. Meskipun pedagang cukup aktif, peran pemerintah masih dominan dan belum tergantikan oleh aktor lain.

Pendapat yang diberikan atau kontribusi untuk pedagang dalam hubungan pihak lain menurut Pak F.I mengatakan.

“Pemerintah juga pada awalnya dinilai kurang hadir dalam pengelolaan kawasan Pantai Kenjeran. Minimnya pengawasan dan pengaturan menyebabkan para pedagang berjualan secara semrawut tanpa penataan yang jelas. Pedagang merasa harus menata sendiri lokasi usahanya, dengan banyak bergantung pada komunikasi informal antar pedagang atau tokoh



masyarakat. Beberapa tokoh kampung atau ketua RW sering menjadi perantara antara pedagang dan pemerintah, meskipun itu bukan bagian dari tugas formal mereka. Baru dalam beberapa tahun terakhir, pedagang mulai merasakan adanya upaya penataan dari pemerintah, seperti pengaturan lapak dan penyediaan fasilitas, namun pelaksanaannya dinilai belum optimal dan masih perlu penguatan peran pemerintah dalam pengawasan rutin maupun pembinaan berkelanjutan.”

Pendapat yang diberikan pada masyarakat dalam hubungan pihak lain menurut pak D.Amengatakan :

“Dulu kawasan Pantai Kenjeran terkesan dibiarkan tanpa pengaturan yang jelas, sehingga pedagang berjualan secara semrawut. Pemerintah dinilai kurang hadir saat itu. Namun, beberapa tahun terakhir mulai ada upaya penataan, meskipun belum berjalan sempurna. Dalam praktiknya, tokoh kampung atau RW sering menjadi perantara komunikasi antara warga, pedagang, dan pemerintah, meski hal tersebut di luar tugas formal mereka”

Dulu, kawasan Pantai Kenjeran kurang teratur karena minimnya pengawasan dan kehadiran pemerintah, sehingga pedagang berjualan secara semrawut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir telah terlihat upaya penataan meskipun belum optimal. Komunikasi antara pedagang, warga, dan pemerintah sering difasilitasi oleh tokoh kampung atau RW, meskipun itu bukan merupakan tugas formal mereka.

2. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

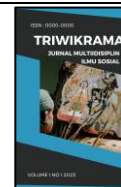
Tata kelola dan pemberdayaan pedagang wisata di kawasan Pantai Kenjeran melibatkan saling ketergantungan yang kuat antara berbagai aktor kebijakan, termasuk Dinas Pariwisata, UPTD, Satpol PP, pedagang, dan masyarakat. Setiap aktor memiliki peran dan sumber daya yang berbeda, yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan nyaman bagi penonton. Meskipun terdapat upaya kolaborasi dan komunikasi, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi yang terstruktur dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan penataan kawasan wisata sangat bergantung pada sinergi antarktor, serta penguatan forum komunikasi yang inklusif dan rutin. Perubahan fungsi eksekutif inti dari Dinas Pariwisata menunjukkan adaptasi terhadap dinamika tata kelola yang lebih kolaboratif. Namun peran pemerintah sebagai pengatur dan fasilitator masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan dan pelatihan. Ketiadaan aktor non-pemerintah yang signifikan dalam pengembangan kawasan juga menjadi kendala, kolaborasi sehingga multiaktor yang lebih terstruktur diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang adil dan berkelanjutan.

Saran

Diperlukan pembentukan forum komunikasi yang terstruktur dan inklusif antara pemerintah, pedagang, masyarakat, dan pelaku swasta sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta merumuskan kebijakan bersama. Keterlibatan aktif masyarakat juga menjadi hal penting yang perlu ditingkatkan melalui musyawarah atau diskusi rutin yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses penyusunan kebijakan dan penataan kawasan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya

*Corresponding author

E-mail addresses: rizaldof7@gmail.com



pendampingan berkelanjutan bagi pedagang, termasuk pelatihan dan akses modal, agar mereka mampu meningkatkan kapasitas pedagang. Kolaborasi dengan sektor swasta juga harus terus didorong, baik melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun kemitraan lainnya, guna memperkuat sumber daya dan fasilitas yang tersedia bagi pedagang. Terakhir, diperlukan sistem evaluasi yang transparan untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah diterapkan, sehingga semua pihak dapat memantau kemajuan sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, F. A. (2018). *Integrasi Pariwisata Di Sekitar Kenjeran*.

Azizah, F. N. (2019). ACTOR NETWORK KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR DI KABUPATEN BANYUMAS. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Damsar. (2002). *Sosiologo Ekonomi*.

Digdowiseiso, K. (2019). Teori Pembangunan Daerah. In *Universitas Terbuka*.

[http://repository.unas.ac.id/652/1/Buku Teori Pembangunan.pdf%0Ahttp://repository.ut.ac.id/4601/](http://repository.unas.ac.id/652/1/Buku%20Teori%20Pembangunan.pdf%0Ahttp://repository.ut.ac.id/4601/)

Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *GOVERNANCE, POLITICS AND THE STATE*.

Rhodes, R. A. W. (2017). Network Governance and the Differentiated Polity: Selected Essays, Volume I. *Network Governance and the Differentiated Polity: Selected Essays, I*, 1-16. www.oxfordscholarship.com

Rosshad, A., Saribulan, N., Verina, V., & Dewi, K. (2024). Jaringan Aktor dalam Tata Kelola Kolaborasi Industri Pariwisata di Kabupaten Kuningan. 13(3), 623-635.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.